



## **KEBIJAKAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN KEADILAN SOSIAL: ANALISIS BERDASARKAN PENDEKATAN CAPABILITY APPROACH**

**Eva Fauziah, Hanny Purnamasari**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam konteks keadilan sosial menggunakan pendekatan Capability Approach oleh Amartya Sen. Metode penelitian ini adalah studi literatur, memanfaatkan berbagai sumber seperti artikel jurnal, buku, laporan kebijakan, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UKT dirancang untuk menyesuaikan biaya pendidikan dengan kemampuan finansial keluarga, implementasinya masih menunjukkan ketidakadilan. Ketidakakuratan dalam penentuan kategori UKT sering kali tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya mahasiswa, menyebabkan beban finansial yang tidak proporsional. Analisis berdasarkan Capability Approach menunjukkan bahwa kebijakan UKT belum sepenuhnya memungkinkan mahasiswa untuk mencapai potensi penuh mereka. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi dan akurasi dalam penetapan UKT serta evaluasi berkala untuk memastikan kebijakan ini benar-benar mendukung keadilan sosial.

**Kata Kunci:** Uang Kuliah Tunggal (UKT), Keadilan Sosial, Capability Approach, Amartya Sen, Analisis kebijakan.

### **PENDAHULUAN**

Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan salah satu kebijakan strategis dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia yang bertujuan untuk mengatur biaya pendidikan di perguruan

tinggi negeri. Kebijakan ini diperkenalkan dengan harapan dapat menciptakan transparansi dan keadilan dalam penetapan biaya pendidikan, serta meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat (Yusuf, 2016). Namun, implementasi

UKT juga memunculkan berbagai polemik terkait keadilan sosial, terutama dalam konteks aksesibilitas pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah (Putri, 2017).

Permasalahan utama yang muncul dari kebijakan UKT adalah bagaimana kebijakan ini dapat menjamin keadilan sosial bagi seluruh mahasiswa, tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka. Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun UKT bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil, namun dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan dalam aksesibilitas pendidikan tinggi (Hidayat, 2018). Hal ini dikarenakan penentuan kategori UKT yang terkadang tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan finansial mahasiswa, sehingga menimbulkan beban biaya yang tidak proporsional bagi beberapa mahasiswa (Arifin, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan UKT dalam konteks keadilan sosial dengan menggunakan pendekatan Capability Approach yang dikembangkan oleh Amartya Sen. Pendekatan ini fokus pada kemampuan individu untuk mencapai kehidupan yang mereka nilai berharga, serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan UKT memungkinkan mahasiswa untuk mencapai potensi penuh mereka (Sen, 1999). Dengan pendekatan ini, penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas UKT dalam memastikan akses pendidikan yang adil dan merata.

Landasan teoritis penelitian ini didasarkan pada teori keadilan sosial dan Capability Approach. Amartya Sen (1999) berpendapat bahwa keadilan harus diukur berdasarkan kemampuan individu untuk melakukan hal-hal yang mereka nilai penting dalam hidup mereka. Dalam konteks ini, kemampuan untuk mengakses pendidikan tinggi yang berkualitas menjadi salah satu indikator

penting dari keadilan sosial (Nussbaum, 2011). Selain itu, teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh John Rawls (2009) juga digunakan untuk mengevaluasi kebijakan UKT dari perspektif keadilan yang berfokus pada distribusi sumber daya yang adil.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dampak kebijakan UKT terhadap keadilan sosial, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh mahasiswa. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan keadilan sosial berdasarkan pendekatan Capability Approach. Metode studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengkaji, dan mensintesis informasi yang relevan dari berbagai sumber yang ada, seperti artikel jurnal, buku, laporan kebijakan, dan dokumen resmi.

Subjek penelitian dalam studi literatur ini adalah berbagai literatur yang membahas kebijakan UKT dan keadilan sosial. Literatur yang ditinjau mencakup penelitian sebelumnya, teori-teori akademik, serta dokumen kebijakan dari lembaga pendidikan dan pemerintah. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak manajemen referensi seperti Mendeley atau Zotero untuk mengorganisir dan mengelola literatur yang dikumpulkan. Selain itu, peneliti menggunakan teknik penelusuran literatur melalui basis data akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan ScienceDirect.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi literatur sistematis, yang mengikuti langkah-langkah sistematis dalam penelusuran, pemilihan, dan analisis literatur yang relevan untuk memastikan komprehensivitas dan validitas hasil. Teknik pengambilan sampel dalam studi literatur ini adalah purposive sampling, di mana peneliti memilih literatur yang secara spesifik membahas kebijakan UKT, keadilan sosial, dan Capability Approach. Literatur yang dipilih mencakup berbagai perspektif untuk mendapatkan pemahaman yang holistik.

Variabel utama yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi implementasi kebijakan UKT di perguruan tinggi, konsep keadilan sosial dalam konteks pendidikan tinggi, dan aplikasi Capability Approach dalam menilai kebijakan pendidikan. Data diperoleh melalui penelusuran literatur di basis data akademik dan perpustakaan digital. Proses ini melibatkan identifikasi kata kunci yang relevan, seleksi literatur berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, serta review literatur yang terpilih.

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dengan menelaah isi literatur yang relevan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai topik yang diteliti. Peneliti menyusun dan membandingkan temuan dari berbagai sumber literatur untuk mengidentifikasi hubungan antara kebijakan UKT dan keadilan sosial berdasarkan pendekatan Capability Approach.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Uang Kuliah Tunggal atau yang kerap disebut dengan UKT merupakan besaran biaya untuk menempuh pendidikan di sebuah perguruan tinggi. Besaran UKT ditetapkan berbeda-beda, tergantung pada program studi dan kebijakan masing-masing PTN. Kebijakan UKT di bawah naungan

Kemendikbud Ristek diatur dalam Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024, yang mengatur mekanisme penetapan UKT dan kriteria penentuan kategori UKT.

Besaran UKT ditetapkan berdasarkan biaya kuliah tunggal dikurangi biaya yang ditanggung pemerintah. Biaya kuliah tunggal merupakan keseluruhan biaya operasional setiap mahasiswa per semester pada program studi di PTN. Sistem UKT dirancang untuk menyesuaikan biaya pendidikan dengan kemampuan finansial keluarga, sehingga tidak ada calon mahasiswa yang terhalang masuk perguruan tinggi negeri karena masalah biaya. UKT dibagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kemampuan ekonomi dari mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan pihak lain yang membiayainya.

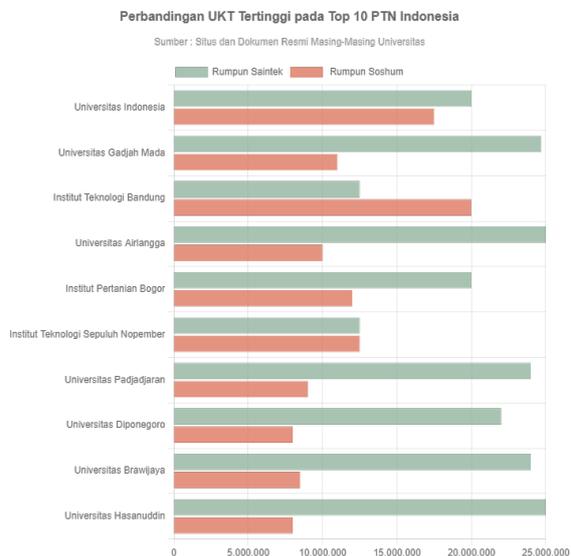
Meskipun sistem UKT membantu menyesuaikan biaya pendidikan dengan kemampuan finansial keluarga, mahasiswa yang telah menyelesaikan beban studi sesuai capaian Satuan Kredit Semester (SKS) dan tinggal menempuh ujian sidang akhir tetap diwajibkan untuk membayar UKT hingga mereka dinyatakan lulus.

Kampus memiliki kewajiban untuk proaktif dan progresif dalam memberikan akses pendidikan tinggi seluas-luasnya kepada mahasiswa, sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Namun, pemberlakuan sistem UKT di PTN tidak menutup keseluruhan biaya mahasiswa selama menjalankan studi. Pasal 11 ayat 3 Permen Ristekdikti Nomor 2 Tahun 2024 menyatakan bahwa PTN tidak menanggung biaya yang bersifat pribadi, biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/magang/praktik kerja lapangan mahasiswa, biaya asrama mahasiswa, dan kegiatan pembelajaran serta

penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa.

Berikut adalah data yang menunjukkan variasi besaran UKT di 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) teratas di Indonesia.



**Gambar 1. Perbandingan UKT Tertinggi pada Top 10 PTN di Indonesia**  
Sumber: data.goodstats.id

Adapun berikut penjelasan mengenai besaran UKT tertinggi dari 10 PTN tersebut yang diperoleh dari situs resmi serta dokumen yang dikeluarkan oleh masing-masing universitas.

Universitas Indonesia menetapkan UKT tertinggi sebesar Rp20 juta untuk program studi di bidang Sains dan Teknologi (saintek), serta sebesar Rp17,5 juta untuk program studi di bidang Sosial Humaniora (soshum).

Universitas Gadjah Mada menetapkan UKT tertinggi sebesar Rp24,7 juta untuk program studi di bidang saintek, dan Rp11 juta untuk program studi di bidang soshum.

Institut Teknologi Bandung, yang beberapa waktu lalu menjadi perhatian publik karena kontroversi terkait tingginya UKT dan penggunaan pinjaman online, menetapkan UKT tertinggi sebesar Rp12,5 juta untuk program studi di bidang saintek. Sementara untuk program studi di

bidang soshum, ITB menetapkan UKT tertinggi sebesar Rp20 juta, menjadikannya sebagai universitas dengan UKT tertinggi di antara 9 universitas lainnya dalam kategori soshum.

Untuk program studi di bidang saintek, Universitas Airlangga dan Universitas Hasanuddin memiliki UKT tertinggi di antara 9 universitas lainnya, yaitu mencapai Rp25 juta.

Secara umum, UKT tertinggi untuk program studi di bidang saintek di setiap universitas biasanya berasal dari Fakultas Kedokteran. Sedangkan untuk program studi di bidang soshum, UKT tertinggi biasanya berasal dari fakultas ilmu ekonomi, bisnis, hukum, dan sosial-politik.

Mekanisme penetapan UKT di setiap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) biasanya melibatkan beberapa tahap yang cermat dan terperinci. Dimulai dari pengumpulan data ekonomi mahasiswa, proses ini mencakup verifikasi dokumen hingga penetapan kategori UKT. Sebagai contoh, di Universitas Indonesia, tahapan awal penetapan UKT dimulai dengan pengumpulan beragam dokumen seperti KTP Calon Mahasiswa/i, Foto/Scan Kartu BPJS/KIS dan Asuransi Lainnya (jika ada), serta dokumen lain yang berkaitan dengan identitas dan kondisi ekonomi mahasiswa. Dokumen-dokumen tersebut kemudian akan diverifikasi untuk memastikan keabsahan dan keakuratannya. Selanjutnya, data yang terkumpul akan menjadi dasar untuk menetapkan kategori UKT yang sesuai. Proses ini juga dapat melibatkan evaluasi faktor-faktor tambahan seperti prestasi akademik atau non-akademik. Selain itu, mekanisme tersebut juga mungkin mencakup prosedur untuk menanggapi keluhan atau banding dari mahasiswa terkait dengan penetapan UKT mereka. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa penetapan

UKT dilakukan secara adil dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, serta mampu memenuhi kebutuhan finansial mahasiswa tanpa memberatkan mereka secara berlebihan.

Namun, implementasi kebijakan UKT di lapangan menunjukkan adanya variasi praktik antara satu PTN dengan PTN lainnya. Studi kasus di Institut Teknologi Bandung mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, masih terdapat beberapa mahasiswa kurang mampu yang merasa terbebani dengan UKT yang diberikan.

Kebijakan UKT memiliki dampak yang signifikan terhadap aksesibilitas pendidikan tinggi. Beberapa mahasiswa melaporkan bahwa kebijakan ini membantu mereka untuk tetap melanjutkan studi tanpa harus memikirkan biaya yang terlalu besar. Namun, ada juga yang mengeluhkan bahwa penetapan kategori UKT tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya, sehingga menimbulkan beban finansial yang berat bagi sebagian mahasiswa.

### **Keadilan Sosial dalam Implementasi Kebijakan UKT**

Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Indonesia dirancang untuk mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial dengan tujuan utama menyediakan akses pendidikan tinggi yang lebih merata bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi. Prinsip dasar dari kebijakan ini adalah menetapkan biaya kuliah yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga mahasiswa, sehingga mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah tidak dibebani dengan biaya pendidikan yang tinggi. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan dan ketidaksesuaian

antara tujuan awal kebijakan dengan realitas di lapangan.

Studi literatur yang telah dikaji menunjukkan bahwa banyak mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah masih menghadapi kesulitan finansial meskipun telah diterapkan sistem UKT. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah kurangnya transparansi dan keakuratan dalam penentuan kelompok UKT. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa proses penilaian kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa sering kali tidak akurat, sehingga ada mahasiswa yang seharusnya masuk ke dalam kelompok UKT yang lebih rendah tetapi dikenakan biaya yang lebih tinggi. Seperti data dari penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati, dkk pada 2021 dengan judul "Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi Uang Kuliah Tunggal di Perguruan Tinggi" menunjukkan bahwa sebanyak sebanyak 68% mahasiswa menyetujui dengan besaran nominal Uang Kuliah Tunggal atau ditetapkan oleh universitas dan 32% mahasiswa menyatakan tidak menyetujui besaran Uang Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan. Namun terdapat 76% mahasiswa menyatakan tidak setuju bahwa orang tua mereka menyetujui dan tidak terbebani dengan nominal Uang Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan dan 24% lainnya menyatakan setuju.

Beberapa mahasiswa melaporkan bahwa mereka masih harus bekerja paruh waktu atau bahkan berhenti kuliah sementara waktu karena tidak mampu membayar biaya kuliah. Data dari penelitian yang dilakukan oleh Elma Mardelina & Ali Muhson pada 2017 dengan judul "Mahasiswa Mekerja dan Dampaknya pada Aktivitas Belajar dan Prestasi Akademik" menunjukkan bahwa kerja part-time memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas belajar dan prestasi akademik. Mahasiswa yang bekerja part-time cenderung memiliki waktu yang lebih sedikit dalam aktivitas

belajar dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak bekerja. Prestasi akademik mahasiswa yang bekerja part-time juga cenderung lebih rendah dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak bekerja.

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan UKT bertujuan baik dan mencerminkan upaya pemerintah untuk mendukung prinsip-prinsip keadilan sosial, implementasinya di lapangan masih perlu banyak perbaikan. Penyesuaian dalam proses penilaian ekonomi dan peningkatan transparansi merupakan beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan kebijakan ini benar-benar dapat mendukung mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi. Dengan demikian, evaluasi dan pembaruan kebijakan UKT sangat penting untuk mencapai tujuan awalnya yaitu memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih adil dan merata.

### **Pengaruh Kebijakan UKT terhadap Aksesibilitas Pendidikan Tinggi**

Dampak kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) terhadap aksesibilitas pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari berbagai lapisan masyarakat menjadi fokus perhatian yang mendalam. Fenomena kenaikan UKT di berbagai perguruan tinggi di Indonesia telah menimbulkan perdebatan yang luas dalam masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa dan orangtua mereka. Meskipun tujuan kebijakan ini adalah untuk memastikan kelangsungan dan kualitas pendidikan tinggi, kebijakan tersebut telah memicu kekhawatiran akan kesetaraan akses terhadap pendidikan tinggi. Hal ini menggugah kesadaran akan pentingnya memastikan bahwa pendidikan tinggi tetap dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka.

Dampak dari kenaikan UKT ini terutama dirasakan oleh mahasiswa berpenghasilan rendah. Besarnya kenaikan UKT, yang mencapai angka yang mencengangkan, menimbulkan keprihatinan akan kemampuan keluarga-keluarga dengan kondisi finansial yang terbatas untuk memenuhi biaya pendidikan yang semakin tinggi. Sebagai respons terhadap kenaikan ini, demonstrasi mahasiswa telah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak hanya tingginya besaran kenaikan UKT yang menjadi sorotan, tetapi juga kebijakan ini dianggap tidak memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, dengan tingginya tingkat pengangguran dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Meskipun alasan yang sering dikemukakan oleh perguruan tinggi untuk kenaikan UKT adalah kesesuaian dengan kebijakan pemerintah, pertanyaan akan keadilan akses terhadap pendidikan tinggi tetap mengemuka. Mahasiswa berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kenaikan UKT ini, mengingat kesulitan mereka dalam memenuhi biaya pendidikan yang semakin tinggi. Kesenjangan antara mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda semakin membesar, memperkuat tantangan dalam mencapai kesetaraan akses terhadap pendidikan tinggi di Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan ini, dampaknya dirasakan oleh mahasiswa yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah dalam mengakses pendidikan tinggi menjadi krusial. Penyusutan aksesibilitas pendidikan tinggi, penurunan keragaman sosial dan ekonomi di lingkungan kampus, serta peningkatan beban kerja bagi mahasiswa yang harus mencari sumber pendanaan tambahan adalah beberapa dari sekian banyak tantangan yang dihadapi.

### **Analisis Capability Approach dalam Konteks Kebijakan UKT**

Analisis Capability Approach dalam konteks kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan berharga melalui akses pendidikan tinggi. Pendekatan ini menyoroti pentingnya tidak hanya memperhatikan aspek materi seperti biaya kuliah, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek non-materi seperti kebebasan, kesempatan, dan kualitas hidup yang dihasilkan oleh pendidikan. Dalam hal ini, UKT dianggap sebagai alat kebijakan yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam mencapai tujuan pendidikan mereka dan mengembangkan potensi penuh mereka. Dengan menggunakan lensa Capability Approach, evaluasi kebijakan UKT tidak hanya fokus pada tingkat akses atau partisipasi, tetapi juga mempertimbangkan sejauh mana kebijakan ini memperluas kemungkinan dan kebebasan mahasiswa untuk memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Analisis Capability Approach juga mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan UKT dapat memiliki dampak yang beragam tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan budaya di mana kebijakan tersebut diterapkan. Misalnya, kemampuan mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda untuk memanfaatkan kesempatan pendidikan tinggi mungkin sangat dipengaruhi oleh akses terhadap sumber daya pendidikan tambahan, dukungan akademik, dan lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu, kebijakan UKT juga dapat memengaruhi kemampuan mahasiswa untuk mengambil risiko dan berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler atau pengalaman

pembelajaran yang memperluas cakupan kemampuan mereka.

Namun demikian, analisis Capability Approach juga menyoroti beberapa keterbatasan dalam konteks evaluasi kebijakan UKT. Salah satunya adalah tantangan dalam mengukur dan menilai kemampuan secara objektif, terutama karena kemampuan seringkali bersifat subjektif dan kompleks. Selain itu, perubahan dalam kemampuan individu juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali kebijakan, seperti kondisi ekonomi global, dinamika pasar tenaga kerja, dan perubahan sosial budaya.

Secara keseluruhan, analisis Capability Approach memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman tentang dampak kebijakan UKT terhadap kemampuan individu dalam mencapai tujuan pendidikan dan mengembangkan potensi penuh mereka. Dengan mengintegrasikan perspektif ini dalam evaluasi kebijakan, kita dapat lebih memahami kompleksitas dan implikasi dari kebijakan UKT dalam memajukan kesejahteraan dan kesetaraan pendidikan.

### **Kesenjangan antara Kategori UKT dan Kemampuan Finansial Mahasiswa**

Analisis terhadap kesenjangan antara penetapan kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan kemampuan finansial mahasiswa merupakan hal yang krusial dalam pemahaman terhadap efektivitas kebijakan pendidikan tinggi. Meskipun UKT memiliki tujuan yang mulia dalam menyesuaikan biaya kuliah dengan kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa, dalam praktiknya, terdapat ketimpangan yang signifikan antara apa yang ditetapkan oleh sistem UKT dan realitas ekonomi individu. Studi kasus dan analisis literatur menyoroti beragam masalah yang muncul dalam proses penentuan kategori UKT. Sebagai contoh, beberapa penelitian menunjukkan

bahwa terdapat mahasiswa yang ditempatkan dalam kelompok UKT yang lebih tinggi meskipun secara faktual mereka tidak memenuhi kriteria untuk masuk ke dalam kelompok tersebut. Ketidaksesuaian ini seringkali dipicu oleh kurangnya representasi aset keluarga yang relevan dalam proses penentuan kategori, sehingga hasilnya tidak mencerminkan dengan akurat kemampuan finansial mahasiswa.

Dampak dari kesenjangan ini dapat sangat membebani mahasiswa secara finansial. Meskipun telah menerima bantuan UKT, beberapa mahasiswa masih menghadapi kesulitan ekonomi yang signifikan. Fenomena ini menjadi lebih menonjol ketika mahasiswa mengalami kesulitan dalam menutupi biaya pendidikan mereka bahkan setelah menerima bantuan UKT. Situasi ini menjadi lebih rumit ketika mahasiswa harus menghadapi pilihan sulit antara melanjutkan pendidikan dengan beban finansial yang berat atau mengundurkan diri dari perguruan tinggi.

Dengan demikian, kesenjangan antara penetapan kategori UKT dan kemampuan finansial mahasiswa bukan hanya merupakan masalah administratif semata, tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam terhadap akses dan kesetaraan pendidikan. Evaluasi yang cermat terhadap sistem UKT diperlukan untuk memastikan bahwa penetapan kategori UKT mencerminkan dengan tepat kondisi ekonomi mahasiswa. Upaya perbaikan dan penyesuaian dalam proses penentuan kategori UKT dapat membantu mengurangi kesenjangan yang ada dan memastikan bahwa kebijakan pendidikan tinggi benar-benar mencapai tujuan inklusi dan keadilan sosial yang diinginkan.

**Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Keadilan dan Inklusivitas UKT**

1. Berdasarkan Temuan Penelitian

- Peningkatan Akurasi dan Transparansi Penetapan UKT Berdasarkan temuan penelitian, penetapan kategori UKT sering kali tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya dari mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan akurasi dalam proses penetapan ini. Pemerintah dan perguruan tinggi perlu mengadopsi teknologi digital untuk mengumpulkan dan memverifikasi data ekonomi mahasiswa secara lebih akurat dan efisien. Selain itu, transparansi dalam proses ini harus dijaga agar penetapan UKT dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini termasuk memberikan akses kepada mahasiswa dan orang tua untuk mengetahui dasar penetapan kategori UKT mereka serta menyediakan mekanisme yang jelas untuk mengajukan banding jika terdapat ketidaksesuaian.

- Penyesuaian UKT bagi Mahasiswa yang Tinggal Menempuh Ujian Sidang Akhir Mahasiswa yang telah menyelesaikan beban studi sesuai capaian Satuan Kredit Semester (SKS) dan tinggal menempuh ujian sidang akhir tetap diwajibkan untuk membayar UKT penuh hingga mereka dinyatakan lulus. Kebijakan ini perlu ditinjau ulang untuk meringankan beban finansial mahasiswa. PTN dapat mempertimbangkan untuk memberikan pengurangan UKT atau menerapkan tarif khusus bagi mahasiswa dalam fase ini, sehingga beban biaya tidak memberatkan mereka yang hanya tinggal menyelesaikan sedikit bagian dari program studinya.

2. Kebijakan Alternatif atau Modifikasi

- Skema Beasiswa dan Bantuan Keuangan Tambahan Selain UKT, pemerintah dan PTN dapat memperkenalkan skema bantuan

keuangan tambahan yang bersifat komplementer. Beasiswa, hibah, atau pinjaman pendidikan dengan bunga rendah dapat diberikan kepada mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah yang masih menghadapi kesulitan ekonomi. Skema ini bertujuan untuk menutupi biaya pendidikan dan kebutuhan hidup lainnya, sehingga mahasiswa dapat fokus pada studi mereka tanpa beban finansial yang berlebihan.

- Implementasi Sistem Sliding Scale Payment Sistem pembayaran berbasis skala geser (sliding scale payment) dapat diterapkan untuk menyesuaikan besaran UKT secara lebih dinamis dengan kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa. Dalam sistem ini, pembayaran UKT dapat disesuaikan secara bertahap berdasarkan perubahan kondisi ekonomi keluarga selama masa studi mahasiswa. Ini akan memungkinkan penyesuaian yang lebih adil sesuai dengan situasi finansial yang mungkin berubah dari waktu ke waktu.

- Evaluasi Berkala dan Penyesuaian Kebijakan Evaluasi berkala terhadap kebijakan UKT dan dampaknya terhadap aksesibilitas pendidikan tinggi sangat penting untuk memastikan kebijakan ini tetap relevan dan efektif. Penelitian longitudinal yang melibatkan analisis data dari berbagai perguruan tinggi dapat memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan ini serta area yang memerlukan perbaikan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian kebijakan secara berkala guna memastikan bahwa sistem UKT terus berkembang sesuai dengan perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan mahasiswa.

- Pembentukan Komite Independen untuk Pengawasan dan Peninjauan UKT Pembentukan komite independen yang terdiri dari perwakilan mahasiswa, staf administrasi, dan ahli

kebijakan pendidikan dapat membantu memastikan bahwa proses penetapan UKT dilakukan secara adil dan transparan. Komite ini juga dapat mengkaji ulang keputusan penetapan UKT dan memberikan rekomendasi untuk penyesuaian jika ditemukan ketidaksesuaian dengan kondisi ekonomi mahasiswa. Komite ini juga bertugas untuk menanggapi keluhan dan banding dari mahasiswa, sehingga ada mekanisme yang responsif untuk mengatasi masalah yang muncul.

- Edukasi dan Sosialisasi tentang Hak dan Prosedur UKT Meningkatkan kesadaran dan edukasi di kalangan mahasiswa dan orang tua tentang prosedur dan hak mereka dalam proses penetapan UKT sangat penting. Sosialisasi yang efektif melalui berbagai media komunikasi dapat membantu memastikan bahwa semua pihak memahami proses dan memiliki akses informasi yang diperlukan untuk mengajukan banding atau mendapatkan bantuan yang sesuai. Dengan demikian, kebijakan UKT dapat benar-benar mencapai tujuan utamanya untuk menyediakan akses pendidikan tinggi yang lebih merata dan adil.

- Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan kebijakan UKT dapat menjadi lebih adil dan inklusif, sehingga mendukung aksesibilitas pendidikan tinggi bagi semua mahasiswa tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka.

### **Implikasi Teoritis dan Praktis dari Temuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki implikasi teoritis yang signifikan terhadap teori keadilan sosial dan Capability Approach. Secara teoritis, temuan penelitian ini memperkuat argumen dalam teori keadilan sosial yang menekankan pentingnya akses yang adil dan merata terhadap sumber daya pendidikan. Sistem UKT yang dirancang untuk

menyesuaikan biaya pendidikan dengan kemampuan finansial keluarga bertujuan untuk mencerminkan prinsip-prinsip keadilan distributif, di mana setiap individu mendapatkan kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan tinggi tanpa terhalang oleh keterbatasan ekonomi. Namun, ketidakakuratan dalam penetapan kategori UKT menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dan implementasi yang ideal, yang mengakibatkan masih adanya beban finansial bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Selain itu, melalui lensa Capability Approach, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan UKT tidak hanya harus mempertimbangkan aspek materi seperti biaya kuliah, tetapi juga perlu memperhatikan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi kemampuan mahasiswa untuk memilih dan mengejar jalur pendidikan yang sesuai dengan aspirasi dan potensi mereka. Dalam hal ini, kebijakan yang tidak tepat sasaran dapat membatasi kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan kapabilitas mereka secara optimal.

Secara praktis, temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia. Pertama, hasil penelitian menggarisbawahi kebutuhan untuk meningkatkan akurasi dan transparansi dalam proses penetapan UKT. Perguruan tinggi dan pemerintah perlu mengadopsi teknologi digital serta mekanisme verifikasi yang lebih efektif untuk memastikan penetapan kategori UKT yang lebih adil. Kedua, kebijakan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi ekonomi mahasiswa, seperti penyesuaian UKT bagi mahasiswa yang tinggal menempuh ujian sidang akhir, dapat membantu meringankan beban finansial dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi. Ketiga, skema bantuan keuangan

dan sistem pembayaran berbasis skala geser dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menutupi kesenjangan finansial yang masih ada. Terakhir, pembentukan komite independen dan peningkatan edukasi serta sosialisasi mengenai hak dan prosedur UKT dapat memastikan proses penetapan UKT yang lebih transparan dan responsif terhadap keluhan mahasiswa. Dengan mempertimbangkan implikasi teoritis dan praktis ini, pemangku kepentingan diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan, sehingga tujuan utama dari sistem UKT, yaitu memberikan akses pendidikan tinggi yang merata bagi semua lapisan masyarakat, dapat tercapai.

## **SIMPULAN**

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Indonesia dirancang untuk mencerminkan prinsip keadilan sosial dan memastikan akses pendidikan tinggi yang merata, masih terdapat kesenjangan antara penetapan kategori UKT dan kemampuan finansial mahasiswa. Ketidakakuratan dalam penetapan kategori UKT menyebabkan beberapa mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah menghadapi kesulitan finansial dalam menutupi biaya pendidikan mereka. Implikasi teoritis dari penelitian ini menyoroti perlunya memperkuat kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan individu, sementara implikasi praktisnya menekankan pentingnya peningkatan akurasi dan transparansi dalam proses penetapan UKT, serta penerapan kebijakan yang lebih fleksibel dan berkeadilan. Dengan demikian, evaluasi dan pembaruan kebijakan UKT sangat penting untuk mencapai tujuan inklusi dan keadilan sosial yang diinginkan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas dedikasi dan ketekunan dalam menyelesaikan penelitian ini. Saya juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada Ibu Hanny Purnamasari, dosen mata kuliah Kebijakan Sektor Publik, atas bimbingan, inspirasi, dan dukungan yang diberikan selama proses penulisan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan finansial dan moral dalam pelaksanaan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat pada umumnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2019). "Ketimpangan dalam Sistem UKT di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Humaniora*.
- Hidayat, A. (2018). "Dampak Kebijakan UKT terhadap Mahasiswa dari Keluarga Berpenghasilan Rendah." *Jurnal Ekonomi Pendidikan*.
- Kurniawati, J., Gresela, J., Alisyahbana, A. N. Q. A., Arisah, N., & Hasan, M. (2021). "Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi Uang Kuliah Tunggal di Perguruan Tinggi." Dalam *PROSIDING PENELITIAN DAN PENGABDIAN 2021* (Vol. 1, No. 1, hal. 1).
- Mardelina, E., & Muhson, A. (2017). "Mahasiswa Mekerja dan Dampaknya pada Aktivitas Belajar dan Prestasi Akademik." *Jurnal Economia*, 13(2), 1.
- Nussbaum, M. C. (2011). *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Harvard University Press.
- Peraturan Mneteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024.
- Putri, R. (2017). "Analisis Kebijakan Uang Kuliah Tunggal: Studi Kasus di Universitas Negeri X." *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Rawls, J. (2009). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Rasyid, N. A. (2024). "Perbandingan UKT Tertinggi pada Top 10 PTN Indonesia." Diakses pada 24 Mei 2024 dari <https://data.goodstats.id/statistic/perbandingann-ukt-tertinggi-pada-top-10-ptn-indonesia-WtU8D>.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1.
- Yusuf, S. (2016). "Kebijakan UKT di Perguruan Tinggi: Perspektif Transparansi dan Keadilan." *Jurnal Pendidikan Indonesia*.